

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa perpecahan dan soliditas elite Partai Golkar pada kemenangan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, mulai dari tahapan Pilkada serentak di Kota Ternate, Partai Golkar selalu diwarnai oleh beberapa fenomena internal antara alite partai dimana terjadi perselisihan antara struktur partai DPD I Maluku utara dan DPD II Kota Ternate dan berakhir pada pemecatan sejumlah kader Golkar Kota Ternate sehingga soliditas elite Partai telah mencair dan harus menerima kekalahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode 2015-2020, Maka untuk menganalisis perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Kota Ternate pada Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Perpecahan Partai Golkar berawal dari dinamika perpecahan elite ditingkat pusat, dalam Munas Tahun 2014 melahirkan dualisme kepengurusan yaitu Abrizal Bakrie dan Agung Laksono dan berimbas di DPD I Maluku utara, DPD I Golkar Maluku Utara memecat sejumlah kader Partai Golkar Kota Ternate yang dianggap mendukung kubu Agung Laksono.
2. Bahwa Pemecatan ketua DPD II Kota Ternate Arifin Djafar dan digantikan Hidayat Djafar Sjah sebagai plt merupakan faktor utama perpecahan elite Kota Ternate
3. Bahwa Perpecahan elite berpengaruh terhadap soliditas partai dalam Pilkada Kota Ternate Tahun 2015
4. Bahwa Hilangnya soliditas elite diakibatkan faktor perpecahan yang sangat menguat diantara elite partai, sehingga berimplikasi terhadap kemerosotan suara dalam Pilkada Kota Ternate Tahun 2015.

6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab V dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perpecahan elite Partai Golkar harus diselesaikan dan bersandar pada aturan main partai politik AD/ART harus dijadikan sebagai pijakan atau pedoman dalam penyelesaian masalah dalam internal Partai Golkar.
2. Mahkamah Partai Golkar (MPG) harus dilihat sebagai tempat memutuskan perkara dalam internal partai, sehingga persoalan suda tidak lagi diinterfensi dari pihak eksternal dalam hal ini adalah pemerintah jika tidak perpecahan ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik.
3. Dalam perpecahan elite Partai Golkar harus mencipkan ruang kompromi dalam penyelesaian masalah agar supaya perbedaan pendapat antara elite kemudian mencair maka akan melahirkan solusi yang efektif.

4. Kekalahan Partai Golkar Kota Ternate pada Pilkada 2015 harus menjadi bahan evaluasi secara internal, dan secepat mungkin melakukan konsolidasi elite partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar Kota Ternate.